

### **BAB III**

## **KIPRAH WWF DALAM ISU *SUSTAINABLE COMMUNITY DEVELOPMENT* DI INDONESIA**

#### **A. *Sustainable Community Development***

Konsep *sustainable development* yang berasal dari laporan *World Commission on Environment and Development* (WCED), konsep ini bukan merupakan Batasan yang absolut namun batasan yang berlaku pada keadaan teknologi dan organisasi social pada sumber daya alam dan oleh kemampuan dari biosfer untuk dapat menyerap dampak dari aktifitas manusia.

Soerjani menjelaskan timbulnya batasan mengenai pembangunan yang didukung oleh *World Bank*, *World Conservation Society* (IUCN), IUCN bersama UNEP dan WWF diantaranya lain mendorong untuk perbaikan sosial ekonomi, pelestarian, sumber daya alam dan memperhatikan pada daya dukung sumber daya alam dan keanekaragamannya untuk periode jangka panjang (Soerjani, 1997:66). Konsep ini disusun dalam suatu strategi yang disebut "*Caring for the Earth: The Strategy for Sustainable Living*" menggantikan *World Conservation Strategy* (WCS) (Hardjosoemantri, 2000: 16-17). Dalam *Caring for the Earth* (CE) (1991) perumusan tentang *sustainable development* digariskan sebagai berikut:

*"improving the quality of human life while living within the carrying capacity of supporting ecosystem. A sustainable economy is the product of sustainable development. It maintains its natural resources base, it can continue to develop by adopting and through improvement in knowledge, organization, technical efficiency and wisdom"* (Santoso, 2001 : 162).

Hal menarik dalam hubungan ini adalah pengakuan akan pentingnya peran hukum guna

mempertahankan pembangunan berkelanjutan. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, untuk pertama kalinya dalam evolusi konsep upaya pembangunan berkelanjutan telah dibuat untuk menguraikan kerangka hukum yang komprehensif untuk membangun pembangunan berkelanjutan. Dalam mengungkapkan pentingnya mekanisme hukum di tingkat nasional, regional dan internasional untuk membangun dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. CE menyatakan bahwa hukum lingkungan, dalam arti luasnya, adalah sarana penting untuk mencapai keberlanjutan (Hardjosoemantri, 2000: 17-18). Oleh karena itu, dalam uraian berikut, dasar hukum untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia dinyatakan.

Kemudian konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan lebih lanjut pada KTT Bumi yang diadakan di Rio de Janeiro pada 3-14 Juni 1992 bagi Manik konferensi ini merupakan momentum global untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan membuat kemitraan dunia untuk mencapai kehidupan dan kualitas dunia, yang lebih baik (Manik, 2003: 19). Konferensi ini menghasilkan berbagai keputusan penting, diantaranya "*The Rio Declaration on Environment and Development*" dan agenda 21. Prinsip pertama dari The Rio Declaration menyebutkan: "*human Beings are as the center of the concern for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.*"

Kemudian berdasarkan Agenda 21, pada tahun 1992 telah dilaksanakannya Sidang Umum PBB dan *The Economic and Social Council* (ECOSOC) yang membentuk *Commision on Sustainable Development* (CSD) beranggotakan 53 negara terpilih oleh ECOSOC dengan mempertimbangkan kelayakan distribusi geografis. Sekretariat CSD yang berbasis di New York dan pertemuan-pertemuan yang diadakan di New York dan Geneva. CSD memiliki tujuan untuk : "*ensure the effective follow-up of (UNCED), as well as to enhance international*

*cooperation and rationalize the intergovernmental decision making capacity for the integration of environment and development issues and to examine the progress of the implementation of agenda 21 at the national, regional and international levels, fully guided by the principles of the Conference, in order to achieve sustainable development* (Rangkuti, 2000:46-47). Ini artinya telah ada suatu Lembaga dunia yang focus pada penanganan pengembangan pembangunan berkelanjutan yang mencakup tatanan nasional, regional dan internasional.

Kemudian pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai kelanjutan dari apa yang telah dibahas di KTT Rio diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan. Lalu dalam KTT ini kemudian ditekankan lagi tentang perubahan paradigma pembangunan. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya harus dilihat sebagai pembangunan ekonomi, tetapi harus memperhatikan dimensi sosial, yaitu tentang kemanusiaan itu sendiri dan ciptaan Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Dengan menggunakan pendekatan tersebut maka pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) memiliki landasan dan fondasi yang lebih solid untuk diterapkan, hanya saja konsepnya masih perlu disosialisasikan secara lebih luas.

Di tahun 1982 dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1982 (LN 1982 No. 12) tentang ketentuan-ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan hidup secara terpadu dengan mengamankan keharusan untuk mengkaitkan pelaksanaan pembangunan dengan pengelolaan lingkungan hidup melalui apa yang dinamakan “pembangunan berwawasan lingkungan” Undang-Undang ini memiliki arti penting tersendiri, dijelaskan oleh Sundari Rangkuti UU LH memuat berbagai konsepsi dari pemikiran inovatif dibidang hukum lingkungan baik nasional maupun internasional yang memiliki implikasi terhadap pembinaan hukum lingkungan Indonesia, sehingga perlu dikaji

penyelesaiannya perundang-undangan lingkungan modern sebagai sistem keterpaduan (Rangkuti, 1991 :6).

Pada pasal 4 huruf d Undang-Undang ini disebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup ialah “terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang”. Tentang definisi pembangunan berwawasan lingkungan dirumuskan dalam pasal 1 angka 13 yang menyatakan bahwa “pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup”. Penjelasan ini mengungkapkan bahwa penggunaan dan pengelolaan sumber daya secara bijaksana berarti senantiasa memperhitungkan efek aktifitas tersebut terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan. Ketentuan tersebut selain menggunakan istilah “pembangunan berwawasan lingkungan” juga memakai sebutan “pembangunan berkesinambungan” sebutan yang digunakan terakhir dapat menjadi pedoman istilah “*sustainable development*” karena kata “berkesinambungan” dan “berkelanjutan “ dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama.

Hal yang dijelaskan kembali pada pasal 3 mengenai asas pengelolaan lingkungan hidup. Di pasal ini disebutkan bahwa “pengelolaan Lingkungan Hidup berbas Pelestarian Kemampuan Lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan penjelasannya menyebutkan bahwa definisi dari pelestarian memiliki arti terwujudnya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, UU ini memiliki pengertian bahwa pembangunan yang berwawasan lingkungan hanyalah satu bagian dari pembangunan yang

berkesinambungan atau sebagai penunjang dari pembangunan yang berkesinambungan (lihat pasal 3).

Konsideran UU No. 23 Tahun 1997 antara lain menjelaskan tentang alasan kita harus menerapkan ‘Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Hidup’ bahwa dalam rangka memanfaatkan sumberdaya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang terkandung dalam UUD 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilakukannya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi selanjutnya.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan ramah lingkungan memiliki hubungan erat dengan pemanfaatan sumber daya alam sebagai aset untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam pertimbangan berikutnya (huruf c) ditekankan bahwa dipandang perlu untuk melakukan manajemen lingkungan untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan yang harmonis dan seimbang untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan perspektif lingkungan. Dalam pertimbangan ini manajemen lingkungan dianggap sebagai dukungan untuk implementasi pembangunan berwawasan lingkungan.

Pada hal ini tampaknya terdapat dimensi ekonomi yang menonjol dalam penguasaan sumber daya alam, yang perlu diperhatikan adalah aspek keberlanjutan dan wawasan lingkungan tidak hanya dalam dimensi ekonomi semata tetapi juga dalam dimensi kehidupan manusia termasuk dimensi sosial-budaya, kesejahteraan sosial pada dasarnya juga harus menyoroati aspek keberlanjutan dan wawasan lingkungan sehingga konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia pada umumnya dan sistem hukum lingkungan pada khususnya. Meskipun penjelasan

dalam peraturan pengelolaan sumber daya alam masih belum begitu jelas.

## **B. Pendekatan yang dilakukan WWF**

Dalam perjalanan sejarah lingkungan hidup secara global, aspek kelestarian lingkungan hidup juga tidak dapat dilepaskan peranan LSM Internasional termasuk *European Communitas (EC)*, *OECD*, *IUCN*, atau *Association of Southeast Asian Nations*. Berbagai LSM Internasional yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah seperti *WWF*, *TNC Indonesia Program*, *WEC*, *OISCA*, *AWB*, *CUSO*, *FWZS*, *ICBP*, *Sticthing FACE*, *Conservation International* maupun *Care International Indonesia* memiliki peranan yang kuat dalam upaya meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup.

*WWF The Conservation Organization* (WWF-Organisasi Perlindungan) sebelumnya bernama *World Wildlife Fund* dan *Worldwide Fund for Nature*, beridiri pada tanggal 1 September 1961 diprakarsai oleh beberapa orang yang memiliki latar belakang yang berbeda yaitu seorang ahli biologi Sir Julian Huxley, Pangeran Bernhard dari Belanda, Max Nicholson dan naturalis serta pelukis Sir Peter Scott yang mendesain logo panda hitam-putihnya. WWF merupakan salah satu organisasi lingkungan terbesar di dunia. Konsep Pembangunan berkelanjutan ini kemudian oleh *IUCN (International Union for The Conservation of Nature)*, *UNEP (United Nations Environmental Programme)* dan WWF (*World Wide Fund For Nature*) dipelajari secara mendalam dalam "*Caring For The Earth*" tahun 1991 sebagai berikut: Terminologi ini dikritik sebagai ambisius dan memunculkan interpretasi yang sangat luas, banyak di antaranya kontradiktif. Kebingungan ini disebabkan oleh istilah "pembangunan berkelanjutan", "pertumbuhan

berkelanjutan", dan "penggunaan berkelanjutan" telah digunakan secara bergantian seolah-olah mereka berarti hal yang sama. Meskipun tidak demikian. "Pertumbuhan berkelanjutan" adalah terminologi yang kontradiktif, tidak ada yang bisa berkembang tanpa batas. "Penggunaan / penggunaan berkelanjutan" hanya dapat diterapkan pada sumber daya terbarukan; itu berarti menggunakan sumber daya ini pada tingkat yang dapat diperbarui. Ungkapan "berkelanjutan" digunakan dalam dokumen ini dalam arti meningkatkan kualitas kehidupan manusia saat mereka hidup dalam daya dukung ekosistem pendukung.

Mengenal WWF-Indonesia dan pekerjaannya di sepanjang kepulauan Indonesia, adalah salah satu negara dengan wilayah pesisir terkaya dan keanekaragaman hayati di dunia. Ironisnya mayoritas penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Setiap tahun, hutan hijau memerah karena terbakar, dan ketika musim hujan tiba, banjir dan tanah longsor membawa bencana bagi banyak orang.

Tujuan utama WWF-Indonesia adalah untuk menghentikan dan memperbaiki kerusakan lingkungan dan membangun masa depan di mana manusia hidup selaras dengan alam. Visi WWF-Indonesia adalah "Pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan". Misi WWF adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan mengurangi dampak yang disebabkan manusia melalui upaya untuk:

- a. Mengkampanyekan etika pelestarian yang kuat, kesadaran serta aksi di kalangan masyarakat Indonesia
- b. Memfasilitasi upaya berbagai pihak untuk melindungi keanekaragaman hayati dan proses ekologis dalam skala ekoregional
- c. Melakukan advokasi kebijakan, hukum dan penegakan hokum yang mendukung upaya pelestarian

- d. Mempromosikan pelestarian bagi kesejahteraan masyarakat, dengan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

WWF sadar bahwa masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya oleh WWF-Indonesia saja. Saat ini, WWF memprioritaskan kerja WWF di pusat keanekaragaman hayati penting yang disebut sebagai *Global 200 Ecoregions*. *Global 200 Ecoregions* adalah peringkat yang diberikan oleh WWF untuk habitat di wilayah darat, air tawar dan laut yang memiliki keanekaragaman hayati penting, termasuk yang berada dalam wilayah politik Indonesia. Program konservasi di Indonesia terletak di 23 lokasi di 16 provinsi, di bidang kelautan, ekosistem air tawar, dan hutan. Upaya WWF adalah menyelamatkan keanekaragaman spesies dengan mempromosikan konservasi yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal. Untuk mengembalikan kerusakan ekosistem dan mengurangi berbagai ancaman seperti yang diakibatkan oleh perubahan iklim dan bahan kimia beracun. Pendekatan yang diambil WWF adalah berkolaborasi Dengan berbagai pihak.

Sejumlah prasyarat perlu dibuat agar upaya konservasi efektif. Ini termasuk memperkuat masyarakat, meminta pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan, dan membuat kebijakan dan praktik yang mendukung konservasi. Namun sampai sekarang ketiga hal ini belum terealisasi di Indonesia. Untuk alasan ini, WWF-Indonesia mempromosikan:

1. Kebijakan konservasi yang kuat di setiap tingkat pemerintahan, mulai dari lokal, regional, nasional dan internasional melalui kegiatan advokasi (10 langkah untuk memberantas pembalakan liar, perdagangan satwa liar ilegal, dll.). WWF juga bekerja pada tingkat perusahaan multi-nasional, mengingat bahwa tanpa pedoman kebijakan



lingkungan dan sosial yang baik, kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dapat berdampak negatif pada upaya konservasi. Melalui keterlibatan langsung perusahaan, WWF mendorong mereka untuk memperkuat kebijakan dan menerapkan praktik konservasi dengan baik.

Memperkuat masyarakat, mendorong masyarakat lokal untuk melindungi sumber daya alam mereka sendiri, serta memainkan peran aktif dalam menentukan pengelolaan sumber daya. WWF mendukung hak mereka untuk mendapat manfaat dari penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, dilindungi dan diakui. Inilah kuncinya agar upaya konservasi di Indonesia berjalan dengan baik. Menghadapi situasi ini, kelompok pengorganisasian masyarakat WWF-Indonesia bekerja secara kreatif untuk memerangi masalah kemiskinan. Di tingkat nasional, WWF melakukan kampanye publik, sehingga orang dapat memahami masalah konservasi dan mengelolanya. WWF membuka pintu lebar bagi partisipasi masyarakat yang aktif untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Bentuk nyata upaya untuk memperkuat masyarakat lokal adalah pembentukan kerjasama antara WWF-Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kolaborasi ini merupakan manifestasi dari visi kolaboratif Pentahelix (Akademik, Bisnis, Komunitas, Pemerintah, Media). Kolaborasi ini merupakan implementasi integrasi pemerintah dan komunitas masyarakat lokal untuk mewujudkan pembangunan hijau dan pembangunan berkelanjutan (Maulana, 2019).

Kegiatan WWF di Indonesia dimulai pada awal tahun 1960-an dengan mendirikan kantor Program WWF Internasional, dengan bantuan Direktorat Jenderal Kehutanan saat itu, melalui Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam. Kegiatan utama pada tahap awal adalah penelitian spesies mamalia, khususnya penelitian badak dan harimau yang terancam punah di pulau Jawa

dan Sumatera. Pada tahun 1965, WWF melaksanakan program di Taman Nasional Ujung Kulon di Provinsi Jawa Barat untuk penyelamatan badak Jawa. Program tersebut yang membawa WWF kepada upaya-upaya lainnya yang bertujuan untuk melestarikan hutan sebagai habitat spesies langka tersebut.

Pada tahun 1998, WWF-Indonesia bertransformasi menjadi Sebuah lembaga nasional dan terdaftar dengan status yayasan. Yayasan WWF-Indonesia secara resmi menandatangani perjanjian kerja sama dengan Departemen Kehutanan melalui MOU No.188/Dj-VI/Binprog/1998 pada tanggal 13 Maret 1998. No. CR/026/III/98.

Dengan adanya status kelembagaan baru, ada perubahan penting antara 1999 dan 2001, struktur manajemen WWF-Indonesia didesentralisasi menjadi tiga kantor bioregion yakni Sundaland, Wallacea dan Sahul. Program konservasi ini memfokuskan upaya di daerah yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati di lebih dari 200 ekoregion global, 19 di antaranya berlokasi di Indonesia. WWF-Indonesia mengembangkan kemitraan dan kemitraan yang melibatkan lembaga pemerintah, LSM, dan dunia bisnis dalam upaya memberikan solusi untuk konservasi alam.

Sistem kerja dalam menyelesaikan masalah di setiap program dilakukan dengan berbagai cara, yakni dengan:

*Field Based Conservation* (Pelestarian berbasis kondisi lingkungan), Di lapangan WWF-Indonesia bekerjasama dengan berbagai ilmuwan, masyarakat pemerintah dan juga pemangku bisnis. Semua actor ini berusaha mengembangkan dan mencari berbagai solusi pelestarian yang inovatif untuk meningkatkan kehidupan berdasarkan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan serta peningkatan keterampilan ekonomi masyarakat.

*Community Empowerment* di Indonesia jutaan orang bergantung pada sumber daya hutan, laut dan pesisir untuk mata pencaharian mereka, banyak di antaranya hidup dalam situasi kemiskinan yang sangat buruk. WWF-Indonesia percaya bahwa perlindungan keanekaragaman hayati dan pemberantasan kemiskinan bisa berjalan beriringan, dan bekerja untuk secara efektif menempatkan kawasan yang dilindungi dalam strategi untuk pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. WWF Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat; memperkuat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk memperoleh hak-hak sosial, mengamankan kesinambungan akses dan penggunaan sumber daya alam di kawasan konservasi; dan membangun keahlian pengembangan kapasitas dalam mengelola sumber daya alam.

*Policy Advokasi*, dengan keadaan ekonomi politik yang kompleks seperti sekarang, kebijakan lingkungan dan sosial yang kuat harus diberlakukan di semua tingkatan dan diimplementasikan secara efektif untuk melindungi keanekaragaman hayati yang berkelanjutan. Maka dari itu, WWF-Indonesia aktif berpartisipasi dalam mengawasi pengambilan kebijakan dari tingkat pemerintahan desa, regional, provinsi, nasional dan internasional.

*Corporate Engagement*, WWF-Indonesia juga berpartisipasi dalam forum-forum para pebisnis, yaitu RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) suatu organisasi yang dibuat guna menekankan pertumbuhan dan pemanfaatan minyak kelapa sawit yang terpelihara lewat kerjasama pengadaan dan dialog terbuka dengan para pelaku usahanya; *Global Forest Trade Network* (GFTN), suatu kerjasama antara pihak-pihak pemerintah dan kelompok-kelompok lingkungan untuk mewujudkan hubungan pasar yang memasarkan kayu dari hutan-hutan yang terpelihara, memerangi penebangan liar; dan *The*

*Forest Dialogue* (TFD), sebuah bentuk dialog internasional antar sejumlah pengusaha yang sedang berjalan, yang fokus pada permasalahan kehutanan. WWF-Indonesia juga menekankan pemeriksaan investasi terpelihara, untuk meningkatkan standar lingkungan dan social yang tinggi, serta praktek-praktek terbaik dalam institusi keuangan.

*Communication and Outreach*, tercapainya upaya konservasi dari WWF-Indonesia itu tergantung pada kemampuan organisasi ini untuk memengaruhi persepsi, kepercayaan, pengetahuan, dan perilaku di semua tingkat sosial, pemerintah, dan industri. Departemen komunikasi dan penjangkauan WWF-Indonesia bekerja dengan program konservasi untuk menjamin kebijakan pemerintah dan industri yang mendukung keanekaragaman hayati; memastikan penekanan pada masalah konservasi di saluran media utama; dan mendorong cara hidup yang berkelanjutan dan mendukung keanekaragaman hayati di semua lapisan masyarakat. Melalui komunikasi dan penjangkauan, WWF-Indonesia membantu memudahkan masyarakat Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan konservasi dan kegiatan konservasi dasar. Pendidikan konservasi adalah masalah yang akrab dengan WWF-Indonesia. Program pendidikan yang dijalankan WWF-Indonesia melengkapi pemahaman tentang lingkungan dan konservasi bagi para pendidik, baik di tingkat taman kanak-kanak maupun kaum muda. Kegiatan dilakukan oleh WWF-Indonesia dengan membawa keyakinan bahwa anak muda di Indonesia dan pendidik bisa meningkatkan peran penting serta berkontribusi dalam mempromosikan budaya yang menjunjung tinggi nilai pelestarian keanekaragaman hayati, sebagai bagian penting dari kehidupan. Dalam implementasi program pendidikan, WWF-Indonesia menggunakan kehidupan sebagai dasar pendidikan untuk mengajarkan bagaimana ekosistem berfungsi, serta mengkampanyekan pemahaman mengenai

nilai ekologis intrinsik keanekaragaman hayati untuk kehidupan di bumi. Selama beberapa dekade terakhir, populasi di Indonesia terus meningkat dengan cepat. Konsumsi telah meningkat secara fenomenal termasuk penggunaan sumber daya tak terbarukan seperti plastik dan bahan petro-kimia lainnya. Habitat alami menghilang dengan cepat, karena bencana lingkungan seperti banjir, tanah longsor dan kebakaran hutan yang semakin umum terjadi. Program pendidikan konservasi WWF-Indonesia, membantu kaum muda untuk mengeksplorasi ketegangan yang disebabkan oleh persaingan antara kebutuhan konsumsi manusia dan tekanan yang mereka timbulkan dan bagaimana ini memengaruhi keberlanjutan kehidupan di bumi. WWF-Indonesia mendorong para guru dan kelompok-kelompok muda untuk mengeksplorasi cara memenuhi kebutuhan manusia dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam. Kelompok ini diharapkan mengambil peran sebagai penanggung jawab untuk memelihara planet Bumi. Beberapa contoh program WWF-Indonesia dalam upaya pendidikan konservasi melalui: Buku cerita konservasi WWF-Indonesia, WWF-Indonesia bersekolah, sumber informasi tentang pendidikan konservasi WWF-Indonesia.

### **C. Program yang Dilakukan WWF-Indonesia**

WWF-Indonesia sudah memulai upaya besar untuk berpindah dari organisasi berbasis proyek ke organisasi berbasis program. Dengan rencana strategis ini pada tahun 2001, sebuah keputusan besar dibuat untuk WWF-Indonesia untuk:

1. Mengembangkan 6 tema program: hutan, laut, spesies, iklim dan energi, air tawar dan toxic/racun.
2. Mengubah manajemen berbasis bioregion menjadi manajemen berbasis program.
3. Membuat sebuah Program atau Divisi Konservasi yang dipimpin oleh seorang Direktur Program/Konservasi.

Di awal tahun 2004 WWF-Indonesia menyimpulkan untuk memfokuskan lebih banyak kegiatan pada 5 program, terkait dengan masalah program *Toxic*, diintegrasikan ke dalam 5 program lainnya. Saat ini Program Air Tawar sedang dalam tahap pengembangan.

Setelah informasi dan masalah lingkungan mencapai publik sehingga WWF telah berhasil mendapatkan dukungan dan mengambil tindakan bersama, kegiatan diplomatik berikutnya yang dilakukan oleh WWF adalah untuk bernegosiasi dengan pemerintah dan aktor yang terlibat dalam masalah lingkungan ini. Harapan perubahan kebijakan yang lebih memperhatikan masalah lingkungan. Dalam proses negosiasi, WWF juga mengajukan saran kebijakan, kebijakan alternatif yang mendukung pelestarian lingkungan berdasarkan penelitian ilmiah. Berkembangnya istilah diplomasi lingkungan, diplomasi hewan, serta beberapa istilah yang telah muncul seperti, diplomasi ozon, bio-diplomasi, diplomasi konservasi, diplomasi nuklir, diplomasi cerobong asap dan sebagainya, yang dapat dengan mudah menjadi strategi diplomasi yang mencakup dua kerusakan lingkungan utama yaitu hewan hijau dan diplomasi. Dalam kasus penurunan populasi harimau Sumatra terkait dua masalah utama ini, ini dapat menjadi ruang bagi diplomasi lingkungan oleh WWF dan aktor-aktor lain yang terlibat di dalamnya.

Sesuai dengan kapasitasnya sebagai lembaga yang memiliki kepedulian terhadap kompensasi, WWF-Indonesia Foundation mendukung sebagai inisiator dengan memprakarsai program, fasilitator yaitu memfasilitasi program keberlanjutan (dan kegiatan) baik yang mendukung keuangan, keahlian / keahlian dan sumber daya manusia, dan dinamisme yang bertujuan untuk membuat program (atau kegiatan) berada dalam kondisi dan proses yang dinamis sesuai dengan persetujuan berbagai pihak.

Selaras dengan ini, konsep manajemen partisipatif dan kolaboratif selalu dikembangkan yang melibatkan

berbagai pihak seperti masyarakat lokal, pemerintah, lembaga penelitian, dan dunia bisnis dalam setiap proses pelestarian alam.

Green Theory (*Green Theory*) muncul sebagai kekuatan politik yang signifikan sejak tahun 1970-an hingga sekarang. Sejarah yang menjelaskan lingkungan telah diturunkan sejak abad ke-12. Ini dibuktikan dengan penebangan hutan Babel, Yunani dan Italia ketika peradaban manusia baru berkembang dan adanya konservasi minyak di peradaban Mediterania dan Cina. Politik Hijau berarti ideologi politik, yang sangat kental dengan nuansa ekologis, kelestarian lingkungan, dan demokrasi partisipatif. Konsep politik hijau mulai dibangun dalam bentuk gerakan konservatif sejak lahirnya Sierra Club di San Francisco, pada tahun 1892. Klub ini menekankan upaya konservasi dan pelestarian alam. Politik lingkungan juga tidak dapat dipisahkan dari gerakan pecinta lingkungan Jerman, yang ditandai dengan berdirinya Partai Hijau Jerman (GGP) 1980 (Matthew, 2001: 238).

Matthew membedakan antara *environmentalism* dengan *green theory*. Secara luas, *environmentalism* menerima kerangka kerja struktur politik, sosial, ekonomi dan normatif dari dunia politik dan mencoba menyalurkan masalah lingkungan yang terkait. Berbeda dengan teori hijau yang menganggap struktur alasan utama krisis Lingkungan dan pertimbangan struktur ini harus ditantang. Dalam Hubungan Internasional, para pemimpin lingkungan menerima perbedaan, mereka terus menerima negara dan struktur politik yang ada, dan negara akan memberikan perhatian serius pada masalah lingkungan. Sementara teori hijau menekankan skeptisisme tentang negara, negara akan merespons sebagaimana dinyatakan oleh para *environmentalism* (Matthew, 2001: 236).

Asumsi dasar dari *green theory* adalah, yang pertama, menolak *anthropocentric* atau *human-centered* dan menitikberatkan pada pendekatan *ecocentric*. Pendekatan

ini berpusat pada komunitas biotik sebagai satu keseluruhan biosfer dan stabilitas komposisi ekologis. Pembangunan dan penggunaan sumberdaya alam oleh manusia haruslah bertanggungjawab dan ada usaha untuk menjaga keseimbangan alam (Matthew, 2001: 238). Yang kedua adalah perlunya pembatasan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat menambah konsumsi manusia. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia bergantung pada alam yang mengakibatkan alam semakin rusak. Pembangunan yang dilakukan hanya berfokus pada pertumbuhan populasi manusia juga dapat merusak lingkungan yang mengancam kehidupan manusia di masa yang akan datang (Matthew, 2001: 239).

Menurut Eckersley dalam Burchill & Linklater (2009) yang menyatakan bahwa itu adalah karakteristik *Green Politics* berlawanan dengan dunia antroposentris yang hanya menempatkan nilai-nilai moral pada manusia yang mengarah pada pandangan yang juga mengarah pada kesetaraan yang mendukung lingkungan yang sempurna. Makhluk hidup (Burchill & Linklater, 2009: 338). Sedangkan Goodin menyatakan nilai dari teori hijau, yaitu asal segala sesuatu yang merupakan fakta yang membuat sejarah dibuat melalui proses alam, bukan buatan manusia (Burchill & Linklater, 2009: 338).

Dobson dalam buku yang sama juga menjelaskan karakter *Green Politics*. Satu, pengganti antroposentrisme, seperti yang diterima Eckersley. Selanjutnya, argumen 'pertumbuhan' terhadap sifat krisis lingkungan. Politik hijau menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang telah mendorong eksponen yang telah terjadi selama dua abad terakhir karena krisis lingkungan saat ini (Burchill & Linklater, 2009: 338).

Sektor-sektor yang dikerjakan oleh WWF-Indonesia meliputi 4 program utama, yaitu:

- a. Program Iklim dan Energi Iklim



Perubahan iklim yang saat ini terjadi telah berdampak pada banyak hal. Pemanasan global yang terjadi adalah fenomena semakin meningkatnya temperatur yang terjadi karena efek rumah kaca yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah emisi gas-gas yaitu karbondioksida, metana, dinitroksida dan *Chloro Fluor Carbon* (CFC) yang mengakibatkan energi matahari terperangkap di atmosfer (Sayyidati, 2017). Berdasarkan laporan IPCC perubahan iklim yang terjadi mengakibatkan naiknya suhu permukaan dunia sebesar  $1.04 \pm 0.09^\circ\text{C}$  antara tahun 2014-2018 (World Meteorological Organization, 2018). Akibat lainnya adalah terjadinya pemutihan (*bleaching*) di terumbu karang yang membahayakan kehidupan masyarakat serta ketidakseimbangan ekosistem laut. Salah satu upaya WWF dalam perubahan iklim ini adalah membentuk komunitas *Earth Hour* yang dimulai di Sydney pada tahun 2007. Gerakan ini setiap tahunnya pada tanggal 30 Maret melaksanakan acara yang bernama *Switch Off* dalam acara ini komunitas *Earth Hour* mengajak masyarakat untuk mematikan listrik selama satu jam untuk menghemat energy. Saat ini komunitas *Earth Hour* sudah tersebar diseluruh dunia

#### b. Program Kehutanan

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang menjadi sorotan adalah deforestasi hutan. Deforestasi dan degradasi terjadi akibat pengalihan fungsi hutan sebagai wilayah pertambangan, permukiman penduduk dan juga alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Dampak dari deforestasi ini menyebabkan pelepasan gas rumah kaca dalam jumlah yang besar dan mengakibatkan perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat perubahan iklim dibutuhkan hutan yang sangat luas karena hutan menyerap karbondioksida yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil. (Greenpeace Indonesia, 2008)

Berdasarkan laporan tahunan *World Wide Fund for Nature* (WWF) mengenai status lingkungan di Kalimantan, sesuai dengan proyeksi yang ada di laporan tersebut jika deforestasi terus terjadi selama masa periode 2015-2020 di bawah skenario *Business As Usual* Kalimantan terancam kehilangan 6.000.000 hektare hutan lagi. Deforestasi menjadi salah satu penyebab yang menyumbang total emisi dunia dan setengah dari total emisi ini berasal dari Indonesia dan Brazil. Hingga tahun 2017 angka deforestasi dalam kawasan hutan tercatat 64,3%, angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2014 yang mencapai 73,6%. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018). WWF-Indonesia bekerja untuk melindungi perbatasan terakhir dari hutan alam Indonesia, menjamin dilakukan pengelolaan produk-produk hutan yang berkelanjutan, dan memperbaiki hutan yang rusak. Dalam upaya pemerintah untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan kerjasama internasional, pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) bekerjasama dengan WWF-Indonesia untuk mengatasi restorasi gambut di 5 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di beberapa provinsi yakni Jambi, Riau, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan (WWF-Indonesia, 2017). Pemilihan WWF-Indonesia sebagai rekan kerjasama dalam upaya restorasi gambut ini juga karena sebelumnya WWF-Indonesia telah berpengalaman dalam restorasi gambut di Sebangau, Kalimantan Tengah hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BRG pada saat penandatanganan kerjasama. Program yang akan dilaksanakan berupa perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengembangan sumber daya, penguatan partisipasi dan edukasi, koordinasi penguatan kebijakan, serta penelitian dan pengembangan terkait dengan kegiatan restorasi gambut (WWF-Indonesia, 2017).

c. *Marine Programme*

Bidang perikanan laut di Indonesia menghadapi ancaman yang sangat berbahaya karena terjadinya eksploitasi yang berlebihan. Warga yang tinggal di wilayah pesisir menggantungkan hidupnya pada bidang kelautan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Saat ini apa yang dialami oleh nelayan-nelayan adalah menurunnya jumlah ikan yang bisa ditangkap. Hal ini dapat dijlaskan dari data yang dimiliki Lembaga Ilmu Pengentahuan Indonesia (LIPI) di 2017 terdapat 33,33% karang yang berstatus buruk di bagian barat Indonesia dan 37,1 di bagian timur (Mahbub, 2018). WWF-Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan jaringan Wilayah Perlindungan Laut. Dalam program ini komunitas dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan memperoleh keuntungan darinya. Pada tahun 2017 WWF-Indonesia wilayah kerja Papua bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tambrauw yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbeagai pihak dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan kaapasitas peran pengelola di Taman Pesisir Jeen Womom (Ferdinandus, 2017).

#### d. *Species Programme*

Pada awalnya WWF masuk ke Indonesia melalui program konservasi hewannya yang dimulai sejak awal 1960-an. Proyek ini diawali dengan penyelamatan Badak Jawa di Ujungkulon. Tidak hanya itu, WWF juga memiliki program konservasi Harimau Sumatera, Orang Utan dan juga Penyu laut. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan bentang lahan (*landscape*). Untuk mengatasi permasalahan spesies ini WWF tidak hanya bekerja sendiri namun juga melibatkan para ahli serta kelompok masyarakat setempat untuk berkontribusi dalam konservasi spesies di wilayahnya.

Dari program iklim dan energi, kehutan, kelautan dan spesies WWF-berupaya untuk bekerja sama dengan

pemerintah maupun komunitas lokal dalam upayanya mewujudkan misi WWF untuk melestarikan, merestorasi dan mengelola ekosistem serta keanekaragaman hayati secara berkeadilan. Upaya-upaya ini berupa penandatanganan kerjasama dengan pemerintah, korporasi serta komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat didukasi serta dibina oleh WWF-Indonesia untuk membantu mewujudkan *sustainable community development*.

#### **D. Project yang dilakukan WWF**

##### *1. Heart of Borneo*

Program-program yang dilakukan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dibagi berdasarkan beberapa kategori salah satunya adalah kategori Wilayah Kerja. Salah satu programnya yang berada di Wilayah Kerja Kalimantan adalah pengembangan ekowisata yang termasuk dalam inisiatif *Heart of Borneo*. Program ekowisata ini melibatkan kerjasama lintas negara antara Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Inisiasi *Heart of Borneo* pertama kali dilakukan oleh WWF Sundaland Bioregion Indonesia di tahun 2001 (Sejarah *Heart of Borneo*). Inisiasi *Heart of Borneo* terdiri dari jaringan hutan hujan kawasan konservasi dan sumber air bagi kepentingan masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hutan ini salah satu tempat yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya.

Pada tanggal 12 Februari 2007 inisiasi ini dideklarasikan oleh ketiga negara. *Heart of Borneo* memiliki tujuan manajemen pengelolaan lintas batas, mengelola kawasan lindung, mengelola sumber daya alam berkelanjutan, mengembangkan ekowisata serta meningkatkan kapasitas manusia sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*Heart of Borneo Strategic Plan of Action*). Luas wilayah dari *Heart of Borneo* mencapai 23.309.278 hektare dengan rincian Indonesia 12.624.380 hektare atau sekitar 56.48%,

Malaysia seluas 9.737.673 atau sekitar 41.93% dan Brunei Darussalam seluas 355.278 atau sekitar 1.59% dari total wilayah (Heart of Borneo - National Working Group, 2009).

Selain bertujuan untuk konservasi, inisiatif *Heart of Borneo* ini juga dimaksudkan untuk mengembangkan pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah serta masyarakat lokal yang berinteraksi langsung dengan sumberdaya yang ada di kawasan *Heart of Borneo* menjadi sangat penting dalam pembangunan kawasan. Dalam upayanya, *World Wide Fund for Nature* (WWF) melalui inisiatif *Heart of Borneo* memiliki lima program *Strategic Plan of Action*.

Yang pertama adalah *Transboundary management*, merupakan program bagi tiga negara yang termasuk dalam *Heart of Borneo* untuk meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan hutan dan penggunaan lahan lainnya. Kedua, *Protected Areas Management* yang bertujuan untuk meningkatkan serta mempromosikan kawasan lindung dalam *Heart of Borneo*. Ketiga, *Sustainable Natural Resources Management* untuk mengelola sumber daya alam di luar jaringan kawasan lindung melalui pengembangan dan penerapan penggunaan lahan berkelanjutan. Keempat, *Capacity Building* yang berfungsi untuk memastikan pelaksanaan program inisiatif *Heart of Borneo* berjalan dengan efektif di semua sector baik publik, swasta maupun masyarakat karena sebagian besar penduduk di Kalimantan bergantung pada sektor pertanian dan hasil hutan sebagai pendapatan utama mereka. Terakhir, *Ecotourism Development* yang dimaksudkan untuk mengenali dan melindungi nilai tempat dan situs budaya serta alam khusus di kawasan *Heart of Borneo*. Program ini merupakan program utama dalam pembangunan sosial-ekonomi di inisiatif *Heart of Borneo* (*Heart of Borneo Strategic Plan of*

Action). Untuk mendukung program ini pemerintah yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Otoritas jasa Keuangan merilis *Sustainable Finance Roadmap* pada 5 Desember 2014. Program ini sendiri terdapat dua periode yakni jangka menengah (2015-2019) dan jangka panjang (2020-2024). Pada periode jangka menengah kegiatannya berupa edukasi mengenai keuangan berkelanjutan. Di periode jangka panjang dilanjutkan dengan integrasi manajemen risiko, tata kelola perusahaan serta membangun sistem informasi yang terpadu. Program ini memiliki rencana kerja strategis yang melingkup mengenai meningkatkan *supply* pendanaan ramah lingkungan, meningkatkan *demand* bagi produk ramah lingkungan, dan meningkatkan pengawasan serta koordinasi untuk mengimplementasikan keuangan berkelanjutan.

## 2. *Ecotourism*

Allcock (Allock, Jones, & Grant, 1993) mendefinisikan ekowisata sebagai pariwisata berbasis alam yang mencakup komponen pendidikan dan dikelola secara berkelanjutan. Menurut *The International Ecotourism Society*, ekowisata adalah sebuah perjalanan wisata ke area alami yang bertujuan untuk melestarikan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (The International Ecotourism Society). Pola ekowisata menekankan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi. Sejak dimulainya inisiatif *Heart of Borneo* minat untuk mengembangkan ekowisata di kawasan ini semakin meningkat. Kegiatan ekowisata ini bertujuan agar dapat membantu masyarakat lokal, menciptakan nilai ekonomis dalam kawasan konservasi serta melindungi ekosistem yang ada di wilayah kawasan *Heart of Borneo*. Jelajah wisata

minat khusus di hutan rimba yang ada di Pulau Kalimantan sudah berlangsung lebih dari 30 tahun. Keinginan untuk mengembangkan ekowisata ini adalah agar dapat memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada di kawasan tersebut.

Mengutip wawancara *World Wide Fund for Nature* (WWF) dengan Arief Data Kesuma (Kesuma, 2017) *Project Leader* di Mahakam Ulu *Landscape Program*, Kutai Barat dipilih sebagai salah satu lokasi untuk pengembangan pembangunan masyarakat berkelanjutan karena area ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi tempat strategis untuk melakukan konservasi sehingga aini bisa memiliki kemungkinan besar untuk dieksploitasi dan merupakan tempat yang baik untuk mendorong keberlanjutan dengan banyak pemangku kepentingan - pemerintah, masyarakat, dan bisnis.

Kabupaten Kapuas Hulu saat ini memiliki dua taman nasional yakni Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK). Keberadaan dua Taman Nasional ini menjadi asset berharga yang dapat berkontribusi bagi lingkungan. Menurut Kepala Balai TNDS, Sahdin Zunaidi, ini merupakan kawasan strategis untuk melindungi fungsi dan daya dukung lingkungan. TNDS sangat mendukung sekaligus memperkuat komitmen ini guna mewujudkan ekowisata yang lebih baik, khususnya di wilayah kelola TNDS (Mengelola Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kalimantan Barat, 2015).

Pendekatan yang dilakukan dalam kerjasama ini melalui pengelolaan yang juga akan dilaksanakan oleh masyarakat dari Desa Melemba melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bertujuan menjadi bentuk pengelolaan hutan yang *responsible*. Nantinya wilayah

hutan yang akan dikelola masyarakat merupakan 59% dari wilayah KPH Kapuas Hulu (Sibau, 2015).

Namun jumlah pengunjung ekowisata di *Heart of Borneo* masih cukup rendah, bahkan di beberapa tempat jumlah pengunjungnya tidak mengalami peningkatan. Masalah bagi ekowisata di kawasan *Heart of Borneo* bukan karena kurang menariknya wisata yang ditawarkan melainkan ancaman terus menerus yang membuatnya terdevaluasi akibat pemanfaatan sumber daya alam yang mengabaikan prinsip-prinsip berkelanjutan (Kehl & Sekartjajrarini, 2013). Kebijakan mengenai pembangunan juga mempengaruhi ekowisata dari eksploitasi sumber daya alam. Padahal menurut salah satu penelitian mengenai potensi ekowisata di wilayah Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS) dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) memiliki indeks nilai potensi 78.20% (Yuniarti, Soekmadi, Arifin, & Noorachmat, 2018).

Berbagai tantangan menghambat perkembangan dari ekowisata ini seperti sulitnya akses menuju lokasi wisata, kurangnya layanan informasi, infrastruktur penunjang yang masih kurang baik, telekomunikasi yang cukup sulit, harga transportasi dan akomodasi yang tinggi, serta adanya tekanan dari masyarakat yang menuntut pembangunan infrastruktur yang lebih baik dari pemerintah.

### 3. *Green Economy*

Saat ini kita dihadapkan dengan tantangan untuk mengembangkan ekonomi hijau, salah satunya adalah karena sulitnya menambahkan point penting lingkungan dalam ekonomi hal ini karena lingkungan tidak bisa dinilai dengan ekonomi yang menjadikan tidak mempunya pasar dihadapkan dengan nilai lingkungan yang berdasarkan penelitian nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan produk dari sumber daya alam (Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Heart of



Borneo, 2014). Menurut penelitian *United Nations Environment Programme* (UNEP) menunjukkan pertumbuhan ekonomi dapat dibantu dengan program konservasi serta pengelolaan dan dikembangkannya kegiatan ekonomi yang menjual jasa lingkungan sebagai contohnya wisata dll (United Nations Environment Programme (UNEP), 2011). Pendekatan ini pun menjadi opsi yang strategis dalam pembangunan ekonomi karena selaras dengan prinsip-prinsip dari *Sustainable Development Goals* serta dinilai dapat mengurangi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh perubahan iklim.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk membantu pengembangan pembangunan berkelanjutan yang menggunakan pendekatan ekonomi hijau. Dalam hal ini penulis mengambil contoh di *Heart of Borneo*. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan adanya interaksi alam dan ekonomi sosial yang bagus, baik dengan konservasi lingkungan ataupun pengelolaan jasa lingkungan yang terorganisir. Apabila upaya ini dapat dilakukan, akan berdampak baik tidak hanya ke ekonomi dan sosial masyarakat namun juga investasi alam untuk masa yang akan datang.

Untuk wilayah *Heart of Borneo* sendiri dapat dilakukan dengan penetapan areal perlindungan dan areal pengelolaan produktif pada daerah konsesi, dan memberikan hak-hak kepada masyarakat tradisional untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Selain itu cara lain yang bisa diterapkan adalah mengurangi penekanan pada sistem alam dengan mengimplementasikan pola pertanian yang berkelanjutan, pertambangan yang ramah lingkungan serta pengembangan ekonomi berbasis keanekaragaman hayati (Kelompok Kerja Nasional (Pokjnas) Heart of Borneo, 2014).

Selain itu ada beberapa upaya lainnya, pertama pemanenan kayu yang berkelanjutan. Yaitu dengan memanfaatkan hasil hutan kayu yang menyesuaikan dengan batas sejauh mana hutan tersebut dapat memproduksi kayu. Kedua, *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai panduan bagi perusahaan dalam mengelola kebun kelapa sawit agar selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Panduan ini sudah ada dalam Peraturan Menteri Pertanian No 19/Permentan/OT.14/3/2011. ISPO sendiri merupakan panduan pengelolaan usaha dalam aspek perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan serta ekonomi dan sosial. Ketiga, pertambangan yang ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan yang berjalan juga tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Seperti pengelolaan limbah dan pengelolaan wilayah paska pertambangan selesai untuk mengurangi dampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Menurut seminar yang dilaksanakan oleh *The World Bank Group: Bank Information Center* yang berjudul "*Responsible Mining: The Key to Profitable Resource Development*" ada delapan prinsip yang wajib dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Prinsip-prinsip tersebut adalah *social and environmental assessment, transparency, acceptance by stakeholders, food production trups questionable mining, compliance with international standards, pre-qualification or certification of potential mining permit seekers, insurance and performance bonds, and royalties, taxes and fees.*

Bentuk dukungan WWF-Indonesia dalam mendukung integrasi masyarakat dalam keuangan berkelanjutan ini adalah mengedukasi kelompok pengrajin yang ada di desa Ujung Jaya dan Cibadak untuk memproduksi patung badak yang dibuat dari sisa-sisa kayu tebangan dari Perum Perhutani maupun

limbah kayu dari masyarakat agar tidak merusak kawasan konservasi Ujung Kulon. Selain itu, masyarakat yang tinggal di wilayah Kanume Tman Nasional Wasur, Papua suku Marind memproduksi minyak kayu putih sejak lama. Hal ini sudah menjadi tradisi leluhur mereka, masyarakat juga menyepakati berbagai peraturan dalam memproduksi minyak kayu putih seperti tidak membongkar pohon, daun yang diambil tidak dipetik hingga habis serta pohon yang diambilnya pun digilir secara berkala. Hal yang dilakukan masyarakat ini membantu upaya konservasi yaitu mengelola hutan secara lestari.

Dalam upayanya untuk mewujudkan program-program yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan WWF juga mengalami berbagai hambatan dan tantangan. Untuk mengatasi hambatan tersebut WWF bekerja sama dengan pihak lain untuk terus mengembangkan pembangunan masyarakat berkelanjutan salah satunya dengan mengadakan pertemuan jaringan ekowisata internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai ekowisata serta potensi destinasi. WWF juga bekerja sama dengan pemerintah setempat serta NGO lainnya seperti TFCA, GIZ Forclime, KOMPAKH dll. Dengan adanya konsep pembangunan masyarakat yang berkelanjutan diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budayanya serta masyarakat menjadi lebih mandiri.